

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian dalam lingkup akuntansi yang terkait dengan perusahaan besar dimana terdapat kasus yang telah terungkap dan dapat menyebabkan krisis keuangan. Kasus tersebut muncul dikarenakan kurang baiknya tata kelola yang dilakukan oleh perusahaan serta kurang diterapkannya transparansi pelaporan keuangan secara maksimal. Perusahaan dituntut untuk menerapkan transparansi dalam mengungkapkan beberapa informasi yang dapat digunakan oleh perusahaan keuangan maupun perusahaan non-keuangan yaitu termasuk informasi mengenai risiko perusahaan (Atika, 2016).

Sesuai dengan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: SE-02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik dimana setiap perusahaan harus melakukan pengungkapan secara penuh. Pengungkapan yang dilakukan perusahaan dapat berupa pengungkapan wajib (*mandatory disclosures*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib adalah pengungkapan minimum yang harus diungkapkan oleh perusahaan dan disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang tidak diwajibkan dan tidak harus sesuai dengan standar yang berlaku sehingga perusahaan bebas memilih jenis informasi yang

akan diungkapkan yang mungkin dapat membantu para pengguna dalam pengambilan keputusan (Aviolanda dan Rohman, 2016).

Pengungkapan risiko merupakan pengungkapan sukarela namun dianggap penting sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang tercantum di dalam PSAK No 60. Dijelaskan bahwa untuk mengevaluasi tingkat dan jenis risiko dalam perusahaan dibutuhkan informasi yang berupa pengungkapan perusahaan keuangan yang terdiri atas pengungkapan kuantitatif dan pengungkapan kualitatif. Untuk pengungkapan kuantitatif dapat mencakup risiko likuiditas, risiko kredit, serta risiko pasar. Sedangkan pengungkapan kualitatif harus mengungkapkan segala tujuan, kebijakan serta segala eksposur risiko.

Selain itu, sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik dimana masing-masing perusahaan harus menerapkan sistem manajemen risiko yang mencakup berbagai jenis risiko dan cara pengelolaannya. Perusahaan juga dapat melakukan *review* atas efektivitas yang telah diterapkan oleh perusahaan setelah adanya sistem manajemen risiko yang sesuai.

Adanya dua peraturan tersebut maka perusahaan non-keuangan harus mengungkapkan walaupun pengungkapan risiko masih berupa himbuan karena pengungkapan risiko dilakukan secara sukarela. Hal tersebut yang menjadikan perusahaan non-keuangan cenderung akan menyajikan informasi risiko masih dalam konteks umum dan kurang terperinci. Sedangkan untuk perusahaan keuangan dituntut untuk jauh lebih ketat dalam hal praktik

pengungkapan sukarela termasuk pengungkapan mengenai risiko dan pengungkapan mengenai keberadaan komite manajemen risiko.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memilih perusahaan manufaktur yang merupakan perusahaan non-keuangan maka pengungkapan risiko yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur masih bersifat sukarela. Pengungkapan risiko memiliki manfaat yaitu dapat meminimalisir terjadinya asimetri informasi antara *principal* dengan agen serta berperan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, pentingnya pengungkapan bagi pihak manajemen yaitu sebagai sarana dalam menjalin komunikasi kepada *stakeholders* atau pemegang saham terkait dengan tata kelola dan kinerja perusahaan (Aviolanda dan Rohman, 2016).

Mekanisme *corporate governance* merupakan mekanisme yang efektif untuk mengendalikan masalah-masalah mengenai keagenan dan memastikan bahwa manajer atau pihak internal tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri namun juga mempertimbangkan kepentingan *shareholders*. Akuntabilitas, transparansi dan praktik pengungkapan perusahaan dapat semakin meningkat apabila sesuai dengan mekanisme *corporate governance* yang baik.

Mekanisme *corporate governance* dapat diuji dengan melihat ukuran dewan komisaris yaitu seberapa banyak jumlah dewan komisaris yang dimiliki perusahaan, selain itu dilihat dari jumlah rapat yang dilakukan oleh para dewan komisaris dalam satu tahun. Beberapa penelitian terdahulu telah menguji bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap *corporate risk*

disclosures dimana ditemukan hasil penelitiannya tidak konsisten atau beragam.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto *et al.*, (2012) yang menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan risiko didapatkan hasil berpengaruh positif. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi (2016) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2014) yang menemukan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko.

Selain menguji pengaruh ukuran dewan komisaris, peneliti lainnya menguji pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan risiko. Penelitian yang telah dilakukan oleh Suhardjanto *et al.*, (2012) yang telah meneliti pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan risiko pada perusahaan perbankan menunjukkan pengaruh yang positif. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Utomo dan Chariri (2012) yang menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Namun, berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Saidah dan Handayani (2014) yang menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko.

Corporate Risk Disclosures (CRD) juga dapat dipengaruhi oleh budaya perusahaan. Budaya perusahaan merupakan sekumpulan nilai yang dijadikan acuan atau kebiasaan dalam menjalankan tugas dan kewajiban di lingkup

perusahaan. Cameron dan Quinn (1999) membagi budaya perusahaan menjadi empat kelompok yaitu budaya *clan*, budaya *adhocracy*, budaya *market* dan budaya *hierarchy*.

Perusahaan dengan budaya *clan* berfokus pada pemeliharaan lingkungan internal perusahaan dan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Beberapa peneliti telah menguji pengaruh budaya *clan* terhadap pengungkapan risiko. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Elkelish dan Hasan (2014) menunjukkan bahwa budaya *clan* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Atika (2016) menyatakan bahwa budaya *clan* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Haniffa dan Cooke (2012) menunjukkan bahwa budaya perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko di Malaysia.

Perusahaan dengan budaya *adhocracy* berfokus pada posisi perusahaan dalam lingkungan eksternal dengan tingkat fleksibilitas dan individualitas yang tinggi. Peneliti yang sudah menguji pengaruh budaya *adhocracy* terhadap pengungkapan risiko adalah penelitian yang dilakukan oleh Elkelish dan Hassan (2014) yang menunjukkan bahwa budaya *adhocracy* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Atika (2016) yang menyatakan bahwa budaya *adhocracy* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Haniffa dan Cooke (2012) menunjukkan bahwa budaya perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko di Malaysia.

Perusahaan dengan budaya *market* berfokus pada lingkungan eksternal perusahaan yang membutuhkan pengendalian. Beberapa peneliti telah menguji pengaruh budaya *market* terhadap pengungkapan risiko. Pada penelitian yang dilakukan oleh Atika (2016) yang menemukan bahwa budaya *market* berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Namun berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Elkelish dan Hassan (2014) menunjukkan bahwa budaya *market* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko.

Perusahaan dengan budaya *hierarchy* berfokus pada lingkungan internal perusahaan yang membutuhkan stabilitas serta pengendalian. Beberapa peneliti telah melakukan pengujian mengenai pengaruh budaya *hierarchy* terhadap pengungkapan risiko. Pada penelitian yang dilakukan oleh Elkelish dan Hassan (2014) menunjukkan bahwa budaya *hierarchy* berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Atika (2016) yang menyatakan bahwa budaya *hierarchy* memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan risiko.

Elkelish dan Hassan (2014) menunjukkan bahwa dari empat tipe budaya tersebut hanya budaya *hierarchy* yang berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko, sedangkan budaya *clan*, budaya *adhocracy* dan budaya *market* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. Pada penelitian yang dilakukan Atika (2016) menunjukkan bahwa budaya *market* dan budaya *hierarchy* berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko dan kedua budaya lainnya yaitu budaya *clan* dan budaya *adhocracy* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko.

terkait dengan pengaruh budaya perusahaan dengan pengungkapan risiko dimana budaya perusahaan di Malaysia masih kental atau mengikuti ras penduduk di negara tersebut yaitu ras Melayu. Melayu merupakan ras Muslim dalam artian bahwa penduduk di Malaysia mayoritas adalah beragama Islam. Malaysia dalam hal pengungkapan sangat mempertimbangkan mengenai transparansi dan akuntabilitas yang baik. Maka perusahaan di Malaysia diharapkan dapat menerapkan transparansi dan akuntabilitas sehingga tercermin sebagai perusahaan yang menjalankan peraturan sesuai dengan standar yang berlaku.

Seperti pada penelitian yang telah dilakukan oleh Haniffa dan Cooke (2002) yang menguji budaya perusahaan di negara Malaysia dalam hal pengungkapan didapatkan hasil yang positif signifikan. Dengan demikian, budaya perusahaan di Malaysia berpengaruh terhadap hal pengungkapan baik pengungkapan wajib maupun pengungkapan sukarela.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Atika (2016) namun terdapat perbedaan yaitu peneliti mengganti ukuran variabel pada mekanisme *corporate governance* yaitu ukuran dewan komisaris dan frekuensi rapat dewan komisaris. Alasan peneliti mengganti ukuran variabel pada mekanisme *corporate governance*, dimana dalam penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen, frekuensi rapat komite audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. Maka, peneliti tertarik untuk menguji ukuran variabel yang berbeda dengan menggunakan ukuran dewan komisaris dan frekuensi

rapat dewan komisaris seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto *et al.*, (2012).

Selain itu, peneliti akan membandingkan perusahaan manufaktur yang berada di Indonesia dengan perusahaan manufaktur yang berada di Malaysia. Peneliti mengacu pada perusahaan manufaktur karena aktivitas yang dijalankan perusahaan manufaktur semakin lama semakin kompleks sehingga akan menimbulkan risiko yang semakin meningkat pula, oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya pengungkapan risiko.

Alasan dipilihnya negara Malaysia sebagai negara pembanding karena Malaysia sebanding dengan Indonesia apabila dilihat dari beberapa aspek, keduanya memiliki sumber daya alam dan geografis yang hampir sama serta tingkat perekonomian yang setara karena Malaysia dan Indonesia merupakan anggota dari *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*. Namun di sisi lain Indonesia dan Malaysia memiliki budaya yang cukup berbeda yang diterapkan masing-masing perusahaan maka peneliti tertarik untuk menguji pengaruh budaya perusahaan terhadap pengungkapan risiko pada kedua negara tersebut.

Berdasarkan perbedaan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh beberapa variabel terhadap pengungkapan risiko dengan judul **“Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Budaya Perusahaan Terhadap Corporate Risk Disclosures** (Studi Komparatif pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia Tahun 2016)”

Penelitian ini akan menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *corporate risk disclosures* yang hanya dilihat dari dua faktor: (1) ukuran dewan komisaris, (2) frekuensi rapat dewan komisaris. Selain itu, penelitian ini juga akan menguji pengaruh budaya perusahaan terhadap *corporate risk disclosures* yang hanya dilihat dari faktor budaya seperti budaya *clan*, budaya *adhocracy*, budaya *market* dan budaya *hierarchy*.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *corporate risk disclosures* di Indonesia?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *corporate risk disclosures* di Malaysia?
3. Apakah frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *corporate risk disclosures* di Indonesia?
4. Apakah frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *corporate risk disclosures* di Malaysia?
5. Apakah budaya *clan* berpengaruh negatif terhadap *corporate risk disclosures* di Indonesia?
6. Apakah budaya *clan* berpengaruh negatif terhadap *corporate risk disclosures* di Malaysia?

7. Apakah budaya *adhoracy* berpengaruh negatif terhadap *corporate risk disclosures* di Indonesia?
8. Apakah budaya *adhoracy* berpengaruh negatif terhadap *corporate risk disclosures* di Malaysia?
9. Apakah budaya *market* berpengaruh positif terhadap *corporate risk disclosures* di Indonesia?
10. Apakah budaya *market* berpengaruh positif terhadap *corporate risk disclosures* di Malaysia?
11. Apakah budaya *hierarchy* berpengaruh positif terhadap *corporate risk disclosures* di Indonesia?
12. Apakah budaya *hierarchy* berpengaruh positif terhadap *corporate risk disclosures* di Malaysia?
13. Apakah terdapat perbedaan tingkat *corporate risk disclosures* di Indonesia dan Malaysia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji pengaruh positif ukuran dewan komisaris terhadap *corporate risk disclosures* di Indonesia.
2. Menguji pengaruh positif ukuran dewan komisaris terhadap *corporate risk disclosures* di Malaysia.
3. Menguji pengaruh positif frekuensi rapat dewan komisaris terhadap *corporate risk disclosures* di Indonesia.

4. Menguji pengaruh positif frekuensi rapat dewan komisaris terhadap *corporate risk disclosures* di Malaysia.
5. Menguji pengaruh negatif budaya *clan* terhadap *corporate risk disclosures* di Indonesia.
6. Menguji pengaruh negatif budaya *clan* terhadap *corporate risk disclosures* di Malaysia.
7. Menguji pengaruh negatif budaya *adhocracy* terhadap *corporate risk disclosures* di Indonesia.
8. Menguji pengaruh negatif budaya *adhocracy* terhadap *corporate risk disclosures* di Malaysia.
9. Menguji pengaruh positif budaya *market* terhadap *corporate risk disclosures* di Indonesia.
10. Menguji pengaruh positif budaya *market* terhadap *corporate risk disclosures* di Malaysia.
11. Menguji pengaruh positif budaya *hierarchy* terhadap *corporate risk disclosures* di Indonesia.
12. Menguji pengaruh positif budaya *hierarchy* terhadap *corporate risk disclosures* di Malaysia.
13. Menguji perbedaan tingkat *corporate risk disclosures* di Indonesia dan Malaysia.

- a. Penelitian ini memiliki tujuan dengan harapan dapat bermanfaat bagi para pengguna dalam memahami terkait dengan pentingnya *corporate risk disclosures* bagi seluruh perusahaan baik perusahaan keuangan maupun perusahaan non-keuangan.
 - b. Penelitian ini berfokus pada praktik *corporate risk disclosures* pada perusahaan manufaktur, sehingga diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna bagi perusahaan manufaktur yang termasuk perusahaan jenis non-keuangan.
2. Manfaat Teoritis
- a. Penelitian ini memberikan bukti empiris yang terkait dengan apa saja faktor yang dapat memengaruhi *corporate risk disclosures*.
 - b. Penelitian ini menyajikan informasi yang bisa digunakan sebagai rujukan penelitian selanjutnya tentang apa saja faktor yang mempengaruhi *corporate risk disclosures*.